

**EVALUASI PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU  
DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL  
DI DESA KEDUNGPOH KECAMATAN LOANO  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018**

Tesis



Diajukan Oleh  
**HIKMAWATI AGUSTINA FREMI**

171103614

**Kepada**  
**MAGISTER MANAJEMEN**  
**STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**  
**2019**

**EVALUASI PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU  
DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL  
DI DESA KEDUNGPOH KECAMATAN LOANO  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018**

**Tesis**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2  
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan Oleh  
**HIKMAWATI AGUSTINA FREMI**

171103614

**Kepada**  
**MAGISTER MANAJEMEN**  
**STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

**2019**

TESIS  
**EVALUASI PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU  
DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL  
DI DESA KEDUNGPOH KECAMATAN LOANO  
KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2019**

Oleh:  
**HIKMAWATI AGUSTINA FREMI**  
**NIM. 171103614**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Dewan penguji

Pada tanggal : April 2019

Dosen Penguji I

.....  
Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I

( Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak )

( Zulkifli, SE, MM )

Dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister  
Yogyakarta, ..... April 2019

Mengetahui

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

DIREKTUR

(.....)

## MOTTO

“Saat kau menjadi satu-satunya orang waras, kau akan terlihat seperti orang gila”

(Criss Jami)

“Stop Dreaming and start doing”

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan membangunkan

(Mario Teguh)

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Almamaterku tercinta STIE Widya Wiwaha yang telah memberi bekal ilmu selama ini.
2. Dosen Pembimbing I dan II yang telah membimbing dalam penyusunan Tesis sehingga tesis ini dapat diselesaikan tanpa hambatan yang berarti.
3. Keluargaku tercinta ayah dan ibuku yang telah memberi dukungan dan semangat baik secara moril maupun materil.
4. Perangkat Desa Kedungpoh yang telah mengizinkan penelitian.
5. Seluruh teman-temanku yang telah memberi dukungan dan semangat.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, April 2019

Hikmawati Agustina Fremi, SE

171103614

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, anugerah, kekuatan, keberkahan dan kenikmatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Evaluasi Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) dalam Perlindungan Sosial di Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2018” dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha guna memperoleh gelar Magister Manajemen. Dalam penulisan tesis ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Zulkifli, SE, MM selaku Dosen pembimbing I
2. Bapak Prof. Dr. Abdul halim, MBA, Ak selaku Dosen pembimbing II
3. Dr. Wahyu Widayat, M.Ec
4. Ketua STIE widya Wiwaha Yogyakarta
5. Seluruh Dosen dan Karyawan pada Progam Pascasarjana Magister Manajemen, yang telah membekali dan memberikan ilmu - ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Rekan – rekan mahasiswa STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
7. Keluarga, Kedua Orang tua yang selalu mendoakan yang terbaik dan selalu memberikan dukungan dan semangatnya.

8. Rekan-rekan perangkat desa Kedugpoh yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penelitian ini.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi dalam penulisan ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penulisan tesis ini.

Yogyakarta, April 2019

Hikmawati Agustina Fremi, SE

171103614

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
BAB II. LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8

2.1.1 Kemiskinan .....	8
2.1.2 Evaluasi .....	14
2.1.3 Basis Data Terpadu .....	24
2.1.4 Perlindungan Sosial .....	32
2.2 Kerangka Pikir Penelitian .....	41
BAB III. METODA PENELITIAN .....	42
3.1 Bentuk dan Lokasi .....	42
3.2 Jenis Data .....	42
3.3 Sumber Data .....	43
3.4 Teknik Cuplikan/Sampel Sumber Data .....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.6 Teknik Analisis Data .....	49
3.7 Validasi data .....	52
3.8 Teknik Penyajian Data .....	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
4.1 Deskripsi Data .....	54
4.1.1 Profil Desa Kedungpoh .....	54
4.1.2 Kondisi Geografis .....	55
4.1.3 Jumlah Penduduk .....	56
4.1.4 Susunan Organisasi .....	56
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi .....	57
4.2 Hasil dan Pembahasan .....	64
4.2.1 Implementasi Basis Data Terpadu (BDT)	

dalam Perlindungan Sosial di Desa Kedungpoh .....	64
4.2.2 Evaluasi Program Basis Data Terpadu di Desa Kedungpoh .....	70
4.2.3 Upaya Pemerintah Kedungpoh Mengatasi Basis Data Terpadu yang tidak tepat sasaran .....	71
4.2.3 Upaya Pemerintah Kedungpoh dalam Pemutakhiran Basis Data Terpadu .....	73
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....	76
5.1 Kesimpulan .....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## DAFTAR TABEL

*halaman*

Tabel 1.1 Terdaftar BDT yang tidak tepat sasaran .....	5
--	---

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR GAMBAR

	<i>halaman</i>
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	36

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar BDT Dusun Kedungpoh Kecamatan Loano
2. Daftar BDT Dusun Kedungrejo Kecamatan Loano
3. Daftar BDT Dusun Wonolalis Kecamatan Loano
4. Daftar BDT Dusun Bandingan Kecamatan Loano
5. Photo Wawancara
6. PERMENSOS RI No.10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
7. PERMENSOS RI No. 28 Tahun 2017 tentang pedoman Umum Verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

STIE Widya Niwaha  
Jangan Plagiat

## **ABSTRAK**

### **Evaluasi Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) dalam Program Perlindungan Sosial di Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo Tahun 2018**

Basis Data Terpadu (BDT) adalah sebuah sistem basis data elektronik mengenai rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang dikelola, disimpan oleh TNP2K. Adanya BDT sangat membantu masyarakat desa dalam mendapat perlindungan sosial serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) dalam Perlindungan Sosial di Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang Evaluasi Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) dalam Perlindungan Sosial di Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan basis data terpadu dalam perlindungan sosial di Desa Kedungpoh secara keseluruhan belum efektif. Selain itu juga belum adanya upaya pemerintah Desa Kedungpoh dalam pemutakhiran data hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman warga, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa serta rendahnya SDM yang dimiliki Perangkat Desa Kedungpoh

## **ABSTRACT**

### ***Evaluation of the Use of Integrated Data Base (BDT) in the Social Protection Program in Kedungpoh Village, Loano District, Purworejo Regency in 2018***

*The Integrated Data Base (BDT) is an electronic database system of poor and vulnerable households in Indonesia that is managed, stored by TNP2K. The existence of the UDB greatly helps rural communities in obtaining social protection and can reduce poverty. The purpose of this study was to find out how to use the Integrated Data Base (BDT) in Social Protection in Kedungpoh Village, Loano District, Purworejo Regency.*

*The form of research used is descriptive qualitative, with the technique of collecting data through interviews with informants who are considered potential to provide information about the Evaluation of the Use of Integrated Data Base (BDT) in Social Protection in Kedungpoh Village, Loano District, Purworejo Regency.*

*The results of this study indicate that the use of an integrated database in social protection in Kedungpoh Village as a whole has not been effective. In addition, there was also no attempt by the Kedungpoh village government in updating the data due to a lack of understanding of the people, lack of socialization from the Village Government and the low level of human resources owned by the Kedungpoh Village Kit.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global, artinya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, namun di negara – negara maju sekalipun, meskipun tingkatannya berbeda - beda. Kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan penduduk untuk memperoleh pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator keterbatasan sering ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan penduduk yang terdiri dari tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi kesehatan. Indikator-indikator tersebut sering digunakan sebagai indikator kemiskinan, (Baharoglu dan Kessides, 2001: 145).

Kondisi kemiskinan Indonesia awal mulanya dirasakan akibat krisis ekonomi yang dinyatakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Perlindungan Sosial di Indonesia, 2014). Krisis tersebut telah membuat krisis multidimensi yang telah menyebabkan banyak penduduk Indonesia masuk ke dalam jurang kemiskinan. Kondisi ini masih terjadi ataupun belum bisa hilang hingga saat ini, meski saat ini kita telah berada di awal abad ke – 21, dimana industrialisasi, pertumbuhan ekonomi dan modernisasi terus meningkat. Keadaan seperti ini memberikan kesadaran tentang kerentanan kondisi ekonomi Indonesia, serta masih pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Perlindungan Sosial

tersebut sudah dimulai sejak Indonesia berdampak krisis ekonomi. Sistem perlindungan sosial ini diawali dengan kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) nasional, terdiri dari program jaminan sosial dan bantuan sosial. Hal ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional, dikarenakan perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan yang dihadapi oleh kelompok miskin dan anggota keluarganya.

Sistem perlindungan sosial ini diamanatkan pula dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tercermin juga dalam pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Perlindungan Sosial diimplementasikan melalui berbagai program, seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program lainnya. Guna menetapkan sasaran program perlindungan sosial perlu didukung oleh data yang akurat dan mutakhir

yang berada dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPPFM) atau disebut juga dengan istilah Basis Data Terpadu (BDT). Data tersebut merupakan data untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial, membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data BDT tersebut jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Penetapan Basis Data Terpadu yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan atau pemberdayaan. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Data yang akurat dan mutakhir, termasuk data calon penerima program perlindungan sosial, akan menjamin program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana Data Terpadu harus diverifikasi dan divalidasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali. Kegiatan validasi dan verifikasi secara berkala ini disebut juga Updating ataupun Pemutakhiran Basis Data Terpadu.

Pemutakhiran Basis Data Terpadu Mulai Tahun 2017 sampai dengan saat ini, dilakukan dua kali dalam satu tahun atau setiap enam bulan sekali

diadakan pemutakhiran. Setiap 6 bulan sekali Desa diberikan kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data melalui mekanisme Musdes, yaitu pergantian Rumah Tangga yang ada di BDT maupun pengusulan warga miskin yang belum masuk ke BDT.

Desa bisa memaksimalkan pemutakhiran data ini, tidak hanya melalui Musdes untuk pergantian dan pengusulan, namun melalui perbaikan data Rumah Tangga yang ada di BDT, pengisian keadan sosial ekonomi RT BDT sesuai dengan keadaan sekarang dengan cara Desa menginput perubahan data RT BDT di aplikasi SIKS.NG. Data Rumah Tangga tersebut diperbaiki sesuai dengan keadaan saat ini, mencakup memperbarui identitas tempat tinggal sesuai perkembangan wilayah terkini, mengumpulkan karakteristik sosial ekonomi, dan mengumpulkan informasi baru yang belum ada sebelumnya.

Meskipun telah diadakan pemutakhiran data, seperti yang tersebut diatas, namun kenyataan dilapangan masih saja ada data yang tidak tepat sasaran, inilah yang sering menimbulkan protes dimana – mana, warga desa yang tidak menerima bantuan protes, Desa yang menjadi ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah, yang langsung berhubungan dengan warga, sering sekali mendapat komplain dari warga, bahwa penerima bantuan / penerima program tidak sesuai (tidak tepat sasaran). Keadaan ekonomi yang setara tingkat kemiskinannya belum tentu mendapatkan bantuan semua, dikarenakan yang satu sudah masuk BDT

yang satunya tidak bisa mengakses bantuan, meski kebutuhan mereka sama dengan tingkat kemiskinan yang sama juga.

Ada juga beberapa kasus di lapangan, yang memperoleh bantuan secara ekonomi sudah baik, sedangkan warga yang perekonomiannya dibawahnya tidak bisa mengakses bantuan dikarenakan tidak masuk dalam basis data terpadu. Contoh lain kasus, yaitu ada beberapa rumah yang tidak layak huni, tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan rehab RTLH dikarenakan tidak masuk dalam BDT. Masih Contoh kasus lagi yang didapatkan di lapangan adalah, warga miskin penderita sakit kronis, tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan berobat gratis berupa (KIS) dikarenakan yang bersangkutan belum masuk BDT. Masalah – masalah yang muncul seperti ini hampir merata di setiap desa, Termasuk di Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, hal ini terlihat dari data yang diperoleh, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Terdaftar BDT yang tidak tepat sasaran

NO	ID	DUSUN	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	KET
1.	3306150015000169	Kedungpoh RT 002 RW04	Hermawan	Pindah Domisili
2	3306150015000150	Kedungrejo RW 02 RT 02	Wagimin	Meninggal Dunia
3	3306150015000101	Wonolalis RW 07 RT 03	Sukadi	Meninggal Dunia
4	3306150015000035	Bandingan RW 05 RT 01	Yahman	Status ekonomi meningkat
5	3306150015000137	Bandingan RW 05 RT 01	Bari	Status ekonomi meningkat
6	3306150015000138	Bandingan RW 05 RT 01	Purwanto	Status ekonomi meningkat

Hal di atas selalu terjadi berulang – ulang, mulai dari awal adanya penggunaan BDT sampai dengan hari ini. Berdasarkan uraian tersebut di

atas, maka penelitian ini mengambil judul “EVALUASI PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI KEDUNGPOH KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018”

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas adalah beberapa penerima manfaat program perlindungan sosial di Desa Kedungpoh tidak tepat sasaran.

## **1.3 PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah Bagaimana Evaluasi dari pemerintah Desa Kedungpoh dalam mengatasi BDT yang tidak tepat sasaran?

## **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan di Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, diharapkan dapat mencapai tujuan yaitu untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa kedungpoh dalam pemutakhiran Data BDT agar tercapai data yang tepat sasaran.

## 1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Memberikan masukan kepada perangkat desa dalam menyajikan data BDT yang akurat dengan cara melakukan pemutakhiran data secara berkala.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kemiskinan**

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak (BPS dan Depsos, 2002). Secara etimologis kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Lebih jauh disebutkan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty treshold*). Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Esmara, 1986). Kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkan dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya pengertian finansial tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.

Menurut Sallatang (1986), Kemiskinan adalah ketidak cukupan penerimaan pendapatan dan kepemilikan kekayaan meteriil tanpa

mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial. Bagi yang memperhatikan konsep tingkat hidup yaitu tidak hanya menekankan tingkat pendapatan saja tetapi juga masalah pendidikan, perumahan, kesehatan, dan kondisi-kondisi sosial lainnya dari masyarakat. Namun demikian, sampai saat ini belum ada definisi baku yang bisa diterima secara umum dari berbagai istilah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan itu sangat kompleks dan pemecahannya pun tidak mudah. Maxwell (2007) menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), tidak adanya keberlanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan adanya perampasan relatif (*relative deprivation*).

Menurut Bank Dunia (2004), kemiskinan adalah kelaparan; kemiskinan adalah ketiadaan tempat berlindung; kemiskinan adalah ketika sakit tidak punya kemampuan untuk berobat; kemiskinan adalah tidak punya akses ke sekolah dan tidak bisa membaca; kemiskinan berarti tidak punya pekerjaan dan ketakutan akan masa depan; kemiskinan adalah tidak punya kekuatan, tidak punya perwakilan politik dan tidak memiliki kebebasan. Poli (1993)

menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan. Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam strategi nasional pengentasan kemiskinan didasarkan atas pendekatan berbasis hak (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005).

Menurut umum penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, termasuk komponen makanan dan bukan makanan. Jadi garis kemiskinan diperoleh dengan menentukan sekelompok pengeluaran yang

diperkirakan cukup untuk kebutuhan konsumsi dasar dan selanjutnya dengan memperkirakan biaya dari kebutuhan dasar ini. Dengan kata lain garis kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai standar minimum yang diperlukan individu untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan.

Kemiskinan oleh profesi pekerjaan sosial lebih dipandang sebagai persoalan-persoalan struktural tetapi dalam upaya pemecahannya pekerjaan sosial menekankan keberfungsian sosial sebagai upaya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjerat individu keluarga, kelompok dan masyarakat. Strategi pekerjaan sosial dalam menanggulangi kemiskinan adalah peningkatan kemampuan individu dan kelompok dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan statusnya. Oleh karena itu, untuk dapat merancang model intervensi dan strategi pemecahan masalah yang tepat maka lebih dulu perlu diketahui mengenai pengertian kemiskinan, karakteristik, indikator dan dimensinya.

Pengertian kemiskinan absolute lebih banyak digunakan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada berbagai sektor pelayanan publik, misalnya dibidang pangan, kesehatan, pendidikan dan perumahan. Untuk mengukur kemiskinan dan kriteria penduduk miskin, pemerintah antara lain menggunakan pendekatan pendapatan atau pengeluaran penduduk untuk

pemenuhan kebutuhan dasar minimum, pendekatan rata-rata per kapita dan pendekatan klasifikasi keluarag sejahtera.

Individu atau kelompok yang merasa dirinya miskin tetapi mempunyai motivasi tinggi untuk mengatasi masalahnya cenderung melakukan berbagai cara dan usaha untuk keluar dari kondisi miskin yang dialaminya. Namun pada individu kelompok tertentu kondisi miskin tersebut dianggap sebagai suatu hal yang biasa, berlangsung dalam waktu yang lama bahkan diturunkan dari generasi ke generasi. Sikap dan pandangan kelompok yang menganggap kemiskinan sebagai hal yang biasa oleh Taylor (2007) disebut sebagai “kondisi membiasanya penderitaan”.

Strategi Penanggulang Kemiskinan (SPK) sangatlah penting bagi daerah, karena akan menjadi acuan bagi semua pelaku baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerahnya. SPK adalah dokumen resmi yang berisi kesepakatan antar stakeholders daerah (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan sesuai kondisi masing-masing daerah. Strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan dijabarkan kedalam 4 (empat) pilar langkah kebijakan yang menjadi acuan bagi stakeholders dalam proses penyusunan poverty reduction strategy papers (PRSP) adalah sebagai berikut :

1. Perluasan kesempatan, yakni pemerintah bersama sektor swasta dan masyarakat menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
2. Pemberdayaan masyarakat, yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat memberdayakan masyarakat miskin agar dapat memperoleh kembali hak-hak ekonomi, sosial dan politiknya, mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi, dan mampu secara mandiri mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
3. Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat miskin agar mampu bekerja berusaha secara lebih produktif dan memperjuangkan kepentingannya.
4. Perlindungan sosial, yakni pemerintah melalui kebijakan publik mengajak sektor swasta dan masyarakat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok masyarakat yang paling miskin (fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, cacat) dan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial.

## 2.1.2 Evaluasi

### 1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama untuk mencapai suatu target, baik itu dalam lingkup pribadi, kelompok, bahkan lingkungan kerja. Evaluasi juga sangat penting dalam meningkatkan efektifitas dan produktivitas dalam penyempurnaan hal-hal di masa mendatang. Kata evaluasi sendiri berasal dari bahasa inggris “*evaluation*” yang berarti penaksiran atau penilaian.

Menurut Arikunto (2004:1) Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Arikunto (2008:10) menambahkan dalam penelitian evaluasi penting bagi peneliti untuk dapat berpikir sistematis, yaitu berpandangan bahwa program yang akan dievaluasi merupakan kumpulan dari beberapa komponen atau unsur yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan program. Oleh karena itu, komponen tersebut dipandang sebagai unsur atau

bagian, tetapi mempunyai peranan penting sebagai faktor penentu keberhasilan program.

Menurut Ahmad (2007:133), mengatakan bahwa “evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek, dan lain-lain) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000:13), mengartikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan.

Menurut Uzer (2003:120), mengatakan bahwa “evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara

acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Menurut Djaali dan Pudji (2008:1), evaluasi dapat juga diartikan sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi”.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi dari para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. “efektivitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisien adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses” (Sudharsono dalam Lababa, 2008).

## **2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi**

Pada dasarnya setiap kegiatan pasti mempunyai maksud dan tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Crawford (2000:30), tujuan dan fungsi evaluasi adalah : 1. Untuk

mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan. 2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil. 3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. 4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Menurut Arikunto (2002:13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

### **3. Teknik Evaluasi**

Untuk membuat sebuah keputusan yang merupakan tujuan akhir dari proses evaluasi diperlukan data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan teknik dan instrumen yang valid dan reliable. Secara garis besar evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan teknik non tes (*alternative test*). Hisyam Zaini, dkk dalam Qomari (2008:8), mengelompokkan tes sebagai berikut : a. Menurut bentuknya; secara umum terdapat dua bentuk tes, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes Objektif adalah bentuk tes yang diskor secara

objektif. Disebut objektif karena kebenaran jawaban tes tidak berdasarkan pada penilaian (*judgement*) dari korektor tes. Tes bentuk ini menyediakan beberapa pilihan untuk dipilih peserta tes, yang setiap butir hanya memiliki satu jawaban benar. Tes subjektif adalah tes yang diskor dengan memasukkan penilaian (*judgement*) dari korektor tes. Jenis tes ini antara lain : tes esai, lisan. b. Menurut ragamnya; tes esai dapat diklasifikasi menjadi tes esai terbatas (*restricted essay*), dan tes esai bebas (*extended essay*). Butir tes objektif menurut ragamnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : tes benar-salah (*true-false*), tes menjodohkan (*matching*), dan tes pilihan ganda (*multiple choice*). Sedangkan dalam teknik non tes dalam evaluasi banyak macamnya, beberapa di antaranya adalah : angket (*questioner*), wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), skala bertingkat (*rating scale*), sosiometri, paper, portofolio, kehadiran (*presence*), penyajian (*presentation*), partisipasi (*participation*), riwayat hidup dan sebagainya.

#### **4. Standar Evaluasi**

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama (Umar, 2002:40), yaitu :

a. *Utility* (manfaat)

Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.

b. *Accuracy* (akurat)

Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.

c. *Feasibility* (layak)

Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

## 5. Model Evaluasi

Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi (Umar, 2002:41), yaitu :

a. Sistem assessment

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu system. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen program yang tengah diselesaikan.

b. Program planning

Yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.

c. Program Implementation

Yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan.

d. Program Improvement

Yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.

e. Program Certification

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan antara model-model evaluasi, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

## **6. Pendekatan-pendekatan terhadap Evaluasi**

Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan.

Mengenal pandangan-pandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan evaluasi suatu

program/kegiatan adalah penting. Ada beberapa pendekatan umum dalam melakukan evaluasi yaitu :

- a. Pendekatan pertama adalah *objective-oriented approach*.

Fokus pada pendekatan ini hanya tertuju kepada tujuan program/proyek dan seberapa jauh tujuan itu tercapai. Pendekatan ini membutuhkan kontak intensif dengan pelaksana program/proyek yang bersangkutan.

- b. Pendekatan kedua adalah pendekatan *three-dimensional cube* atau *Hammond's evaluation approach*.

Pendekatan *Hammond* melihat dari tiga dimensi yaitu *instruction* (karakteristik pelaksanaan, isi, topik, metode, fasilitas, dan organisasi program/proyek), *institution* (karakteristik individual peserta, instruktur, administrasi sekolah/kampus/organisasi), dan *behavioral objective* (tujuan program itu sendiri, sesuai dengan taksonomi Bloom, meliputi tujuan kognitif, afektif dan psikomotor)

- c. Pendekatan ketiga adalah *management-oriented approach*.

Fokus dari pendekatan ini adalah system (dengan model CIPP : *context-input-proses-product*). Karena pendekatan ini melihat program/proyek sebagai suatu sistem sehingga jika tujuan program tidak tercapai, bisa dilihat dip roses bagian mana yang perlu ditingkatkan.

d. Pendekatan keempat adalah *goal-free evaluation*.

Berbeda dari tiga pendekatan diatas, pendekatan ini tidak berfokus kepada tujuan atau pelaksanaan program/proyek, melainkan berfokus pada efek sampingnya, bukan kepada apakah tujuan yang diinginkan dari pelaksana program/proyek terlaksana atau tidak. Evaluasi ini biasanya dilaksanakan oleh evaluator eksternal.

e. Pendekatan kelima adalah *consumer-oriented approach*.

Dalam pendekatan ini yang dinilai adalah kegunaan materi seperti *software*, buku, silabus. Mirip dengan pendekatan kepuasan konsumen di ilmu pemasaran, pendekatan ini menilai apakah materi yang digunakan sesuai dengan penggunaannya, atau apakah diperlukan dan penting untuk program/proyek yang dituju. Selain itu, juga dievaluasi apakah materi yang dievaluasi di *follow-up* dan *cost effective*.

f. Pendekatan keenam adalah *expertise-oriented approach*

Dalam pendekatan ini, evaluasi dilaksanakan secara formal atau informal, dalam artian jadwal dispesifikasikan, standar penilaian dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Proses evaluasi bisa dilakukan oleh individu atau kelompok. Pendekatan ini merupakan pendekatan tertua di mana evaluator secara subyektif menilai kegunaan suatu

program/proyek, karena itu disebut *subjective professional judgement*.

g. Pendekatan ketujuh adalah *adversary-oriented approach*

Dalam pendekatan ini, ada dua pihak evaluator yang masing-masing menunjukkan sisi baik dan buruk, disamping ada juri yang menentukan argument evaluator mana yang diterima.

Untuk melakukan pendekatan ini, evaluator harus tidak memihak, meminimalkan bias individu dan mempertahankan pandangan yang seimbang.

h. Pendekatan terakhir adalah *naturalistic & participatory approach*.

Pelaksanaan evaluasi dengan pendekatan ini bisa para *stakeholders*. Hasil dari evaluasi ini beragam, sangat deskriptif dan induktif. Evaluasi ini menggunakan data beragam dari berbagai sumber dan tidak ada standar rencana evaluasi. Kekurangan dari pendekatan evaluasi ini adalah hasilnya tergantung siapa yang menilai (Salehudin, 2009:5).

Berbagai pendekatan untuk mengevaluasi suatu program atau proyek diterapkan untuk mendapatkan keefektifan dan keefisien program atau proyek tersebut baik secara internal yaitu pihak pengembang atau pengelola, maupun secara eksternal yaitu pengguna. Bentuk-bentuk pendekatan evaluasi yang telah ada

harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kepuasan pengguna sebagai tujuan utama suatu program dijalankan.

### **2.1.3 Basis Data Terpadu**

#### **1. Pengertian Basis Data Terpadu (BDT)**

Basis Data Terpadu (BDT) adalah sebuah sistem basis data elektronik mengenai rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang dikelola dan disimpan oleh TNP2K. Data ini dirancang khusus untuk mendukung kementerian dan lembaga yang ingin merencanakan suatu program pengentasan kemiskinan. BDT mencakup 40% dari populasi Indonesia dengan kondisi sosial ekonomi paling bawah. Basis data ini mencakup tidak hanya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tetapi juga mereka yang tergolong rentan.

BDT dimanfaatkan oleh berbagai pelaksana program pengentasan kemiskinan, baik di pusat maupun di daerah. Keberadaan BDT telah mengubah paradigma pelaksanaan program. Jika sebelumnya kepesertaan program ditentukan oleh masing-masing pelaksana program menggunakan sumber data yang berbeda-beda, dengan adanya BDT, kepesertaan program mulai ditentukan dari satu sumber data yang sama. Saat ini BDT dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K), yang menyediakan akses kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan.

Keberadaan BDT sebagai sumber data tunggal juga berkontribusi terhadap upaya mencapai komplementaritas antar program. Pembangunan BDT sebenarnya terkait sejarah panjang upaya pendataan penduduk miskin, yang sudah dimulai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar empat dekade silam. Pada tahun 1976, BPS untuk pertama kalinya menghasilkan data kemiskinan makro berupa perkiraan jumlah penduduk miskin di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Data diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), kegiatan tahunan yang sudah dilaksanakan sejak 1963.

SUSENAS dilaksanakan setiap tahun, namun data kemiskinan makro yang dihasilkan tetap hanya memberikan perkiraan angka agregat penduduk miskin. Data yang ada tidak dapat memberikan nama dan alamat rumah tangga yang dikategorikan miskin.

Dua penyebab utama adalah BPS terikat peraturan sesuai Undang-undang statistik untuk tidak membuka data responden kepada publik dan SUSENAS hanya merupakan data survey sehingga hanya dapat memberikan informasi mengenai rumah tangga sampel. Akibatnya tidak tersedia data yang dapat

dimanfaatkan untuk menyasar calon penerima manfaat suatu program. Secara spesifik, pembangunan BDT sendiri bisa dikatakan dimulai sejak tahun 2005, meskipun belum sepenuhnya terorganisir dengan baik seperti yang dilakukan akhir-akhir ini. Saat itu, pemicu kebutuhan adanya data induk penduduk miskin yang terpadu adalah keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Akibat kebijakan ini harga kebutuhan pokok naik dan daya beli masyarakat turun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menerapkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin. Program BLT membuat pemerintah memandang penting tersedianya data rumah tangga miskin beserta anggota keluarganya lengkap dengan nama dan alamatnya. Tujuannya agar ada kejelasan sasaran atau penerima manfaat program. Kebutuhan ini mendasari dilaksanakannya Pendataan Sosial Ekonomi (PSE). Pendataan ini adalah sensus kemiskinan pertama di Indonesia yang berisi data nama dan alamat rumah tangga miskin, tidak hanya sekedar perkiraan angka agregat.

PSE menghasilkan data kemiskinan mikro terbesar pada saat itu, karena enumerasi dilakukan terhadap sekitar 19,1 juta rumah tangga atau 32% dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia. Selain itu, penentuan rumah tangga miskin pada PSE

mulai memanfaatkan sejumlah karakteristik demografi dan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga. Jadi penentuan rumah tangga miskin tidak lagi menggunakan *basic needs approach* yang mengacu pada besaran nilai konsumsi atau pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar minimum.

## 2. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT)

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) adalah kegiatan nasional untuk melakukan perbaikan terhadap data karakteristik rumah tangga Basis Data Terpadu (BDT). PBDT ini dinilai perlu karena manfaatnya telah dirasakan secara luas oleh pemerintah. Selain itu BDT, yang telah berusia empat tahun, diperkirakan tidak lagi sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi. Selama kurun waktu tersebut sangat mungkin terjadi peningkatan sosial ekonomi pada rumah tangga yang termasuk dalam BDT. Demikian pula sebaliknya, sangat mungkin terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi pada segmen masyarakat yang sebelumnya tidak masuk dalam BDT.

Pelaksanaan PBDT didasarkan pada dua payung hukum yang telah diterbitkan oleh Pemerintah yakni Perpres Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk

membangun keluarga produktif. Ada tiga inovasi yang dilakukan PBDT yang pertama daftar awal rumah tangga yang disusun berdasarkan hasil PPLS dilengkapi dengan data hasil pemutakhiran kepesertaan sejumlah program perlindungan sosial. Berbagai data tersebut antara lain berasal dari pemutakhiran Program Raskin, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program JKN, data rumah tangga berdasarkan Formulir Rekapitulasi Pengganti Kartu Perlindungan Sosial, data kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan data hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Inovasi yang kedua adalah pelibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), untuk menyepakati daftar rumah tangga sasaran pendataan. Selanjutnya inovasi ketiga adalah dengan melakukan perbaikan pada metodologi pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga melalui pendekatan *Proxy Mean Test* (PMT).

Pemutakhiran BDT terdiri dari empat tahapan utama yang saling terkait. Tahap pertama, merupakan tahap persiapan yang terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu penyusunan daftar awal rumah tangga dan penyusunan daftar pertanyaan. Penyusunan daftar awal rumah tangga menjadi tanggung jawab TNP2K, sedangkan penyusunan daftar pertanyaan menjadi tanggung jawab BPS. Dalam pelaksanaannya kedua kegiatan ini

melibatkan berbagai pihak, terutama kementerian dan lembaga yang menjadi pengguna BDT.

Tahap kedua adalah pelaksanaan konsultasi dengan masyarakat melalui FKP, bertujuan untuk mengonfirmasi keberadaan rumah tangga miskin dan rentan yang ada dalam daftar awal, menjangkau rumah tangga miskin lain yang belum terdaftar dan menandai *inclusion error*. FKP dilakukan dalam bentuk pertemuan antara masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan yang dipandu oleh fasilitator (pendamping independen). Namun untuk wilayah padat penduduk, FKP dilakukan pada tingkat dusun atau Rukun Warga (RW).

Tahap ketiga adalah pencacahan langsung di tingkat rumah tangga yang dilakukan secara *door-to-door*. Pencacahan dilakukan oleh petugas lokal yang terlatih, untuk memutakhirkan informasi terkait dengan kondisi rumah, status sosial-ekonomi anggota rumah tangga, kepemilikan aset, dan kepesertaan program.

Tahap terakhir adalah pemeringkatan rumah tangga hasil pencacahan. Kegiatan utama dalam tahap ini adalah pemeringkatan rumah tangga dengan menggunakan pendekatan PMT. Pendekatan ini semakin populer digunakan di banyak negara. Selain data yang diperoleh dari proses sebelumnya, input utama lain yang digunakan dalam pemodelan PMT adalah SUSENAS 2011-2014 dan PODES 2014. Data yang diolah

mengacu pada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan demografi dan sosial-ekonomi penduduk dan rumah tangga yang memiliki kesesuaian antara SUSENAS dan hasil pendataan PBDT 2015.

Pemutakhiran BDT Periode 2018 ini sudah diserahkan kepada Kementerian Sosial, Penetapan data Fakir Miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diamanatkan bahwa Kementerian Sosial menetapkan kriteria Fakir Miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan Fakir Miskin. Di samping itu dalam Pasal 8 ayat (4), Kementerian Sosial juga melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Pasal 8 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) menjelaskan bahwa Verifikasi dan Validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada di kecamatan, desa/kelurahan/nama lain, dan hasil Verifikasi dan Validasi

tersebut dilaporkan kepada bupati/wali kota. Selanjutnya bupati/wali kota menyampaikan hasil Verifikasi dan Validasi tersebut kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Menteri bertanggung jawab untuk memelihara Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang telah diverifikasi dan divalidasi. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai Data Terpadu menjadi tanggung jawab Menteri. Mengingat perubahan kondisi penerima manfaat bersifat dinamis yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan demografis penduduk, perubahan status sosial ekonomi, mobilitas penduduk maka Kementerian Sosial perlu melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara berkala. Agar pelaksanaan Verifikasi dan Validasi tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan termonitor dengan baik, Kementerian Sosial saat ini telah mengembangkan SIKS-NG. Modul Verifikasi dan Validasi pada SIKS-NG sampai dengan saat ini telah digunakan oleh lebih dari 256 (dua ratus lima puluh enam) daerah kabupaten/kota yang secara aktif melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Melalui kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan SIKS-NG, kesalahan karena inclusion error (menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat/ineligible sebagai penerima manfaat) dan exclusion error (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat/eligible sebagai penerima manfaat) dapat diminimalisasi. Cakupan kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ini yaitu Fakir Miskin yang berada di dalam Rumah Tangga biasa dan bertempat tinggal tetap serta yang tinggal di panti dan di tempat yang tidak tetap atau berpindah-pindah. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu maka cakupan kegiatan Verifikasi dan Validasi secara berkala sebaiknya di tingkat daerah kabupaten/kota.

#### **2.1.4 Perlindungan Sosial**

##### **1. Pengertian Perlindungan Sosial**

Perlindungan sosial merupakan sebuah konsep luas yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah dan berbagai organisasi di dunia telah melakukan usaha perluasan perlindungan sosial hingga pada negara-negara berkembang dalam beberapa dekade ke belakang. Melalui

kebijakan perlindungan sosial, pemerintah negara-negara di dunia berusaha menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses atas layanan sosial bagi seluruh penduduknya. Cakupan dalam kebijakan pendekatan perlindungan sosial diantaranya meliputi penjaminan keamanan pendapatan pokok, yang dapat berbentuk bantuan dan jaminan sosial, seperti dana pensiun bagi penduduk usia lanjut serta penyandang disabilitas, tunjangan bantuan penghasilan, jaminan pekerjaan, serta layanan bagi para pengangguran dan penduduk miskin. Kebijakan perlindungan sosial juga mencakup penyediaan akses universal akan pelayanan sosial yang terjangkau dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar seperti akses terhadap air dan sanitasi, ketahanan pangan, perumahan dan layanan lainnya.

International Labour Organization (ILO) (1984), mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sebuah sistem yang disediakan melalui serangkaian kebijakan publik untuk meminimalkan dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang dapat disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari, penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian. Sistem perlindungan sosial yang komprehensif diantaranya dapat terdiri dari program jaminan sosial, bantuan sosial, serta mencakup skema-skema bantuan dan jaminan dana

yang didanai oleh pemerintah maupun kontribusi dari pesertanya. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) (2012) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai serangkaian kebijakan publik dan privat yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kerugian dan kemiskinan. Setidaknya terdapat dua hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif dan berkesinambungan. Koordinasi dengan penyedia investasi perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas dari layanan publik yang bersangkutan. Strategi perlindungan sosial juga perlu dirangkai dalam sebuah rangkaian kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih luas sehingga dapat mempercepat pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sekumpulan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui usaha perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan hilangnya pendapatan. Menurut ADB, perlindungan sosial setidaknya mencakup lima elemen, yakni asuransi sosial, bantuan sosial, perlindungan komunitas dengan skema mikro dan skema berbasis area, pasar tenaga kerja, serta perlindungan anak (Ortiz, 2001). Konsep perlindungan sosial mencakup jaring pengaman sosial sebelumnya masih

bersifat tradisional. Dalam dokumen *Social Protection and Labor Strategy*, World Bank menyebutkan bahwa perlindungan sosial mencakup jaring pengaman sosial, investasi pada sumber daya manusia, serta upaya-upaya penanggulangan pemisahan sosial. Perlindungan sosial harus mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya dan lebih berfokus kepada pencegahan, bukan lagi kepada gejala dan akibat.

Perlindungan sosial juga menjadi salah satu instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan pemenuhan target dalam *Millenium Development Goals* (MDGs), diantaranya melalui penjaminan akses universal terhadap layanan-layanan pokok untuk ibu hamil, pendidikan, nutrisi, hingga kesehatan lingkungan. Menyadari pentingnya peran sistem perlindungan sosial dalam mendukung pembangunan serta pemberantasan kemiskinan, pada tahun 2009 *United Nations* (UN) meluncurkan *Social Protection Floor Initiative* (SPF-I). Landasan perlindungan sosial pada sebuah negara setidaknya harus mencakup empat pokok hal penting : jaminan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial pokok lainnya; jaminan keamanan pendapatan dasar bagi anak-anak dengan tujuan untuk memfasilitasi akses terhadap nutrisi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan penting lainnya; jaminan keamanan pendapatan untuk penduduk usia aktif yang

tidak mampu memperoleh pendapatan yang diperlukan; serta jaminan keamanan pendapatan untuk penduduk berusia lanjut.

## **2. Landasan Konseptual Perlindungan Sosial**

Konsep perlindungan sosial dibagi menjadi dua dimensi dalam memperluas jaminan sosial, yang terdiri dari serangkaian jaminan sosial pokok bagi semua orang (dimensi horisontal), serta pelaksanaan secara bertahap dengan standar yang lebih tinggi (dimensi vertikal). Hal ini sesuai dengan konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial. Perlindungan sosial tidak semata terbatas pada bantuan sosial dan jaminan sosial. Menurut Barrientos dan Shepherd (2003), perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaring pengaman sosial. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas (Conway, de Haan dkk;2000). Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka.

Landasan perlindungan sosial erat kaitannya dengan Agenda Pekerjaan yang layak (ILO, 2012). Untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan, landasan perlindungan sosial harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro pekerja. Saat ini, beberapa negara sudah memasukkan elemen-elemen utama tersebut ke dalam sistem perlindungan sosial yang mereka miliki. Pada negara-negara dengan penghasilan menengah ke bawah, akses pada program perlindungan sosial sejalan dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan dan transformasi sosial lainnya.

Menurut Scott (2012), konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam, pengangguran, hingga kematian. Fokus perlindungan sosial yang terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut kerap dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. Dengan meningkatnya perhatian dunia untuk mendukung pembangunan yang lebih merata, secara bertahap perlindungan sosial

berevolusi menjadi sistem yang lebih berfokus kepada tindakan preventif dan promotif dalam jangka panjang. Pendekatan konsep perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-penyebab kemiskinan dan berusaha untuk mengatasi batasan-batasan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh penduduk rentan. Menurut Guhan (1994) memandang bahwa perlindungan sosial memiliki komponen yang lebih luas, diantaranya mencakup komponen perlindungan, pencegahan, serta promosi. Komponen perlindungan terdiri dari berbagai kebijakan yang bertujuan memastikan tingkat kesejahteraan minimal untuk masyarakat yang kesusahan. Komponen pencegahan berisikan berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah masyarakat yang tergolong rentan untuk jatuh dibawah standar kesejahteraan yang ditentukan. Komponen promosi mencakup kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan setiap individu di masa mendatang.

Konsep perlindungan sosial yang luas diantaranya dipicu oleh kekhawatiran dunia akan risiko guncangan sosial ekonomi serta ancaman terhadap penghidupan yang semakin besar. Perluasan konsep perlindungan sosial juga salah satunya dibahas dalam Pertemuan Puncak Pembangunan Milenium tahun 2010 oleh ILO bersama para kepala negara dan pemerintahan dunia. Perlindungan sosial menjadi sebuah bagian terpadu dari

kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial untuk semua penduduk. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong rentan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam seluruh siklus kehidupan. Menurut U.K. Department For International Development (DFID) (1999), terdapat setidaknya tiga jalur untuk mewujudkan konsep pendekatan perlindungan sosial yang seimbang. Pertama, melalui peningkatan keamanan dengan membantu rumah tangga dan komunitas untuk meningkatkan kesinambungan penghidupannya dalam menghadapi guncangan ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan, serta bentuk guncangan lainnya. Kedua, melalui peningkatan kesetaraan dengan memperbaiki tingkat penghidupan untuk menjamin keterpenuhan hak-hak dasar seluruh penduduk serta dengan meningkatkan konsumsi masyarakat miskin. Ketiga, melalui peningkatan pertumbuhan dengan menjamin akses setiap rumah tangga untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, membangun nilai-nilai solidaritas sosial, serta menyediakan lingkungan yang menjamin kemudahan individu dalam beradaptasi. Sementara itu Scott (2012) juga menambahkan bahwa tipe program perlindungan sosial yang paling umum

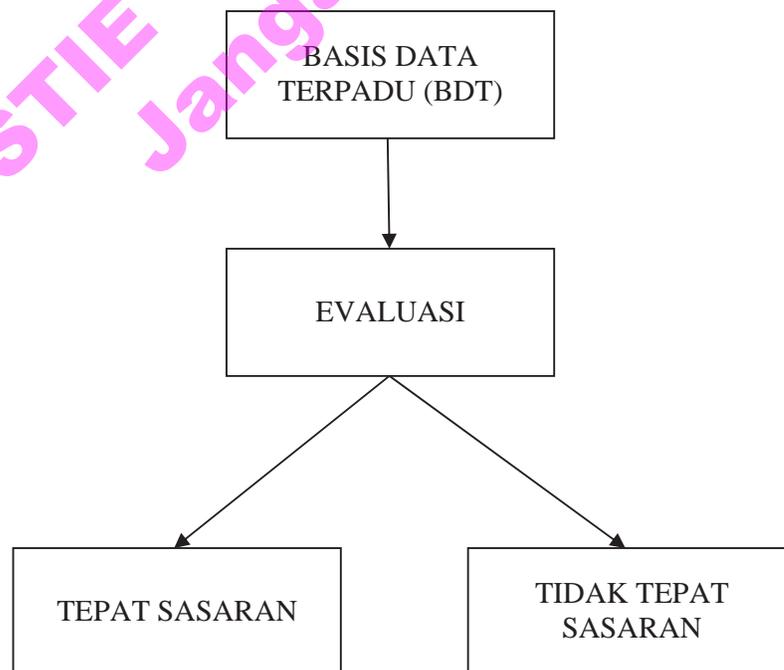
mencakup bantuan sosial, jaminan sosial, intervensi pasar tenaga kerja dan program berbasis komunitas/informal. Van Ginneken (1999) serta Ferreria dan Robalino (2010) mengklasifikasikan program perlindungan sosial menjadi dua kelompok, yakni program bantuan sosial (*social assistance*) dan program jaminan sosial (*social insurance*).

Berdasarkan hal tersebut secara umum perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Tujuan utama yang diharapkan dengan terlaksananya perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan; meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, serta memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam bab ini, penjelasan mengenai perlindungan sosial secara lebih lanjut akan difokuskan menjadi dua bagian, yakni bantuan sosial serta jaminan sosial.

## 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Riduwan (2004:8) Kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah penelitian. Menurut Muhamad (2009:31) kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Kerangka Pikir dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana implementasi pemutakhiran basis data terpadu di Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Kemudian akan dianalisis dan dievaluasi bagaimana penggunaan basis data terpadu terhadap perlindungan sosial di Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



## **BAB III METODA PENELITIAN**

### **3.1 Bentuk dan lokasi**

Pendekatan penelitian yang akan di gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana bentuk penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan informan yang bersumber dari data lisan, tertulis dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri. Dengan bentuk penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran berbagai makna yang bisa digali dari masyarakat/organisasi sehingga dapat diperoleh informasi kualitatif yang lebih bermakna dari sekedar pernyataan gambar dalam bentuk angka atau frekuensi dalam bentuk angka-angka.

Penelitian yang dilakukan ini hanya mengungkapkan secara deskriptif melalui analisa kualitatif. Pendekatan ini berdasarkan pada batasan lengkap obyek yang di tetapkan dalam rancangan penelitian ini. Sebagai obyek penelitian dipilih Pemerintahan Desa Kedungpoh di wilayah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

### **3.2 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik secara lisan maupun tulisan dan digunakan untuk mendukung data lainnya. Data tersebut bersumber dari dokumen yang ada pada Pemerintahan Desa

Kedungpoh di wilayah Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo dan wawancara langsung dengan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo dan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya (Marzuki,2005). Data Primer yang ada dalam hal ini adalah Basis Data Terpadu Desa di desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki,2005). Data sekunder diperoleh dan sudah di himpun oleh pihak luar, sehingga peneliti tinggal mempergunakan. Dengan kata lain data sekunder pada perpustakaan dalam arti luas yang meliputi orang, dokumen, monografi, hasil penelitian, makalah dalam seminar, lokakarya, majalah ilmiah, buku-buku dan sebagainya. Data sekunder akan dihimpun dengan teknik studi pustaka dan daftar kebutuhan informasi sebagai alat peraga. Adapun

kegunaan data sekunder adalah untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian.

c. Informasi

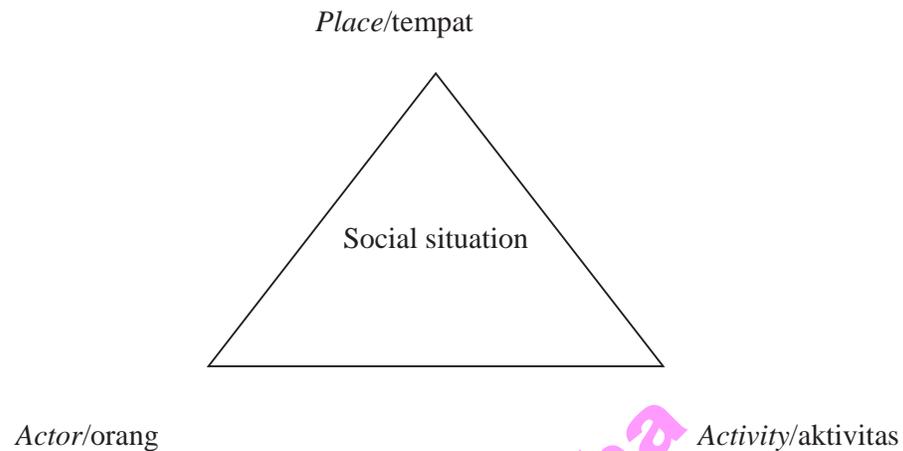
Ada dua metode dasar untuk memperoleh data dari informan, yaitu komunikasi dengan responden dan observasi terhadap informan. Komunikasi dengan informan merupakan hal yang utama karena kebutuhan informasi studi ini berkaitan dengan data tentang karakteristik obyek studi. Sedangkan observasi terhadap informan dilakukan pula untuk melengkapi dan memantapkan data yang diperoleh melalui komunikasi dengan informan.

d. Situasi analogis

Mencakup studi tentang kasus (*case study*). Desainnya mencakup penyelidikan secara intensif terhadap situasi yang relevan dengan situasi permasalahan. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif dari kasus dan merumuskan pemahaman yang lebih baik dari obyek dan variabel yang sedang di teliti.

### 3.4 Teknik Cuplikan / Sampel Sumber Data

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi (Sugiyono, 2008 : 215) tetapi dinamakan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang terintegrasi secara sinergis. Situasi sosial yang dimaksud seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 3.1  
Situasi Sosial

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di transferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari (Sugiyono, 2008 : 390)

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif lebih ditunjukan untuk menarik generalisasi dari populasi. Sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat *purposive sampling*, dimana peneliti cenderung untuk memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang mantap dan mengetahui permasalahan secara mendalam. Teknik semacam ini lebih dapat disebut *internal sampling*. Untuk menentukan informan yang tepat, ditentukan atas dasar informasi

formal maupun informal. Dalam hal ini dilakukan terlebih dahulu untuk menghindari adanya informan ganda dengan fungsi yang berbeda.

Pemilihan informan secara tepat akan membantu peneliti agar secepatnya dan seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat (Licoln & Cuba, 1985). Kecuali itu, informan yang dipilih secara tepat berfungsi untuk membantu menjangkau informasi, untuk bertukar pikiran atau untuk membandingkan suatu informasi yang diperoleh dari informan lain (Bogdan & Biklen, 1994). Mengingat pentingnya informan, maka dalam pelaksanaan pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan karena biasanya dalam mencari sebuah informasi pasti akan muncul perkembangan kondisi maupun informannya.

Sampel sumber data untuk penelitian ini dipilih secara *purposif* dan bersifat *snowball sampling*. Penentuan sampel sumber data dengan cara memilih orang/informan yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial di desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo sehingga mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan Basis Data Terpadu (BDT) dalam perlindungan sosial masyarakat desa di Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

Dalam penelitian ini pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan informasi adalah :

1. Informan harus menguasai dan memahami tentang Basis Data Terpadu (PBDT) Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.
2. Informan yang memiliki waktu yang cukup memadai dan mengetahui tentang Basis Data Terpadu (BDT) dan Penggunaannya.
3. Informan yang langsung mengetahui dan menangani secara langsung tentang Basis Data Terpadu (BDT).

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data. Berdasarkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Teknik Observasi merupakan salah satu cara yang baik untuk mengumpulkan dalam penelitian kualitatif, meskipun hanya bersifat partisipasi pasif (Spradley, 1980), karena penelitian tidak terlibat atau berperan langsung dalam kegiatan sebenarnya. Observasi ini dilakukan secara formal atau tidak formal untuk mengamati berbagai peristiwa dan kondisi obyek. Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada Pemerintahan Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo guna memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang akan diteliti.

## 2. Interview / Wawancara

Interview / wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung (Djumhur dan Muh. Surya, 1985).

Jenis wawancara ditinjau dari segi pelaksanaannya dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Wawancara bebas yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara secara bebas, peran wawancara bebas menanyakan apa saja tetapi tetap memperhatikan data yang akan dikumpulkan.
- b. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti dimaksud dalam wawancara terstruktur.
- c. Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaannya pewawancara membuat pedoman yang nantinya merupakan garis besar hal-hal yang akan ditanyakan (Ari Kunto, 2016 : 156).

Dalam melakukan penelitian tentang Prioritas penggunaan Dana Desa, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara membuat pedoman yang nantinya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena penelitian.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen atau sumber sumber tertulis serta arsip –arsip lainnya yang sesuai dengan penelitian. Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi dimasa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (H.B .Sutopo,2006:80). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumenter yaitu data statis dan dinamis yang diambil dari data yang dimiliki desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini memperhatikan tiga komponen utama yang harus dipahami dan diperhatikan setiap peneliti yaitu, reduksi data, salinan data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sutopo, 1990). Analisis data menggunakan metode penggolongan deskripsi dengan

mengikuti pola pikir induktif yaitu pengujian data yang bertitik tolak dari data yang telah dikumpulkan kemudian penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan data

Peneliti bertindak sebagai seorang yang mengidentifikasi masalah informan dan menguraikan apa yang telah didengar secara nyata tanpa mengurangi atau mempengaruhi opini responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, *focus group information* maupun observasi yang selanjutnya disalin dalam bentuk transkrip hasil wawancara.

b. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi satuan atau bagian yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah, kemudian dibuat koding yaitu memberi kode pada setiap bagian agar dapat ditelusuri dari sumber data. Selanjutnya dilakukan katagorisasi yaitu upaya memilah atau mengelompokkan data kedalam bagian yang memiliki kesamaan dan dicari kaitan antara satu kategori dengan kategori yang lain.

c. Verifikasi dan penyajian data

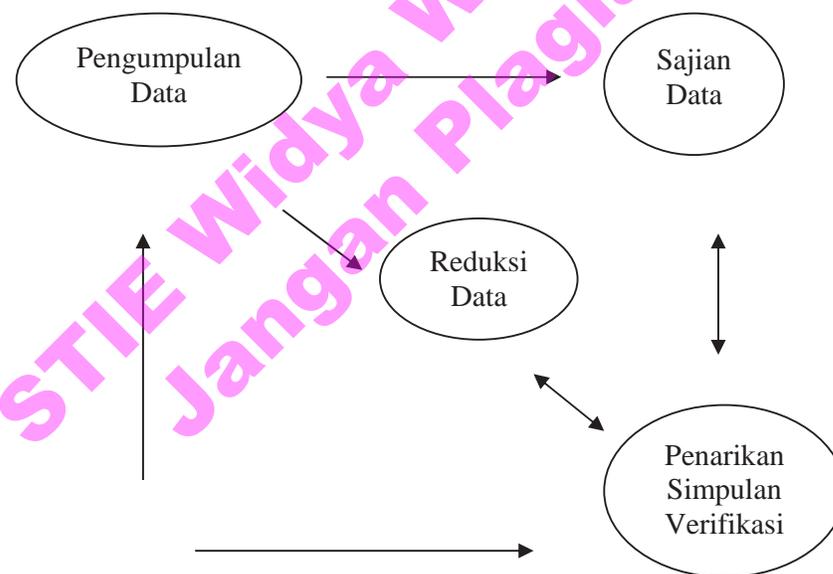
Melakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif sesuai dengan variabel yang diteliti.

d. Menarik kesimpulan

Pada penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh dengan pertanyaan penelitian dengan hasil penelitian dan teori. Analisa hasil data

wawancara menggunakan teknik kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh informasi dan pemahaman yang mendalam tentang Evaluasi pemutakhiran BDT dalam program penanggulangan kemiskinan. Apabila peneliti kurang mantab dengan kesimpulan karena ada kekurangan dalam reduksi dan sajian data, maka peneliti dapat menggalinya dalam *file note*. Proses analisis interaktif dapat ditunjukkan dalam bagan dibawah ini (lihat gambar. 2).

Perlu dijelaskan pula disini, bahwa secara keseluruhan pola pemikiran studi ini bersifat *emprico induktiv* (Kirk and Miller, 1996).



**Gambar. 2**  
**Model Analisis Interaktif**

### 3.7 Validasi Data atau Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian validasi data atau pengujian keabsahan data merupakan faktor penting dalam penelitian. Oleh karena itu perlu pemeriksaan data sebelum analisis dilakukan. Ada beberapa teknik pemeriksaan data yang dipergunakan untuk meningkatkan atau mengetahui validasi data, seperti triangulasi, *review informan*, dan penyusunan semua mata rantai bukti penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Denzin membedakan adanya empat macam triangulasi yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 1989).

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan :

- a. Data observasi dengan wawancara.
- b. Apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
- c. Apa yang dikatakan informan didepan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- d. Keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang yang latar belakangnya berlainan.
- e. Hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

Dengan triangulasi penelitian dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkan dengan sumber, metode dan teori. Untuk itu peneliti dapat melakukan dengan cara : mengajukan pertanyaan yang bervariasi, mengecek dengan berbagai sumber data dan memanfaatkan berbagai metode agar

pengecekan kepercayaan dapat dilakukan. Triangulasi dilakukan pada sumber yakni pada Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo yang dipilih peneliti.

Reliabilitas (keterandalan) pada penelitian kualitatif dapat dicapai dengan auditing dan atau mendokumentasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam serta terinci dan dikelompokkan sesuai dengan topik penelitian. Setiap data yang diperoleh dianalisa untuk mengetahui makna dan hubungan dengan masalah penelitian.

### **3.8 Teknik Penyajian Data**

Data dari hasil penelitian perlu disajikan agar permasalahan yang ada dapat dibahas secara sistematis dan jelas. Adapun teknik penyajian data menggunakan uraian serta dijelaskan dengan kualitatif, dianalisis melalui penjelasan-penjelasan secara *descriptive*. Sedangkan data yang diolah atau dianalisis akan disajikan dalam bentuk tabel dan lampiran.